



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018



**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

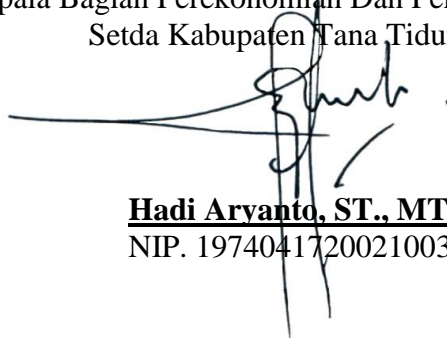
KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 ini selain berisi tentang Struktur, Uraian Tugas Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Program dan Kegiatan, Rencana Kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018, yang disusun sebagai sesuatu acuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan menyesuaikan tujuan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018. Disamping itu hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKT merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Selain itu RKT juga berperan sebagai kendali, penilai kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance* dan sebagai wujud transparansi alat pertanggungjawaban OPD.

Akhir kata, semoga RKT Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai Pengendali, Penyediaan informasi, dan untuk bahan evaluasi.

Tideng Pale, 15 Januari 2018
Kepala Bagian Perekonomian Dan Pembangunan
Setda Kabupaten Tana Tidung



Hadi Aryanto, ST., MT
NIP. 1974041720021003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dalam melaksanakan kegiatannya.

Di dalam kerangka akuntabilitas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dalam ranah akuntabilitas publik.

Sebagai bagian dari SAKIP, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijabarkan di dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor .. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor .., Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai sesuatu acuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan menyesuaikan tujuan Rencana Kerja Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Tahun 2018.



1.3.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Sebagai bukti laporan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang ingin dicapai.

BAB II

TUGAS POKOK DAN STRUKTUR

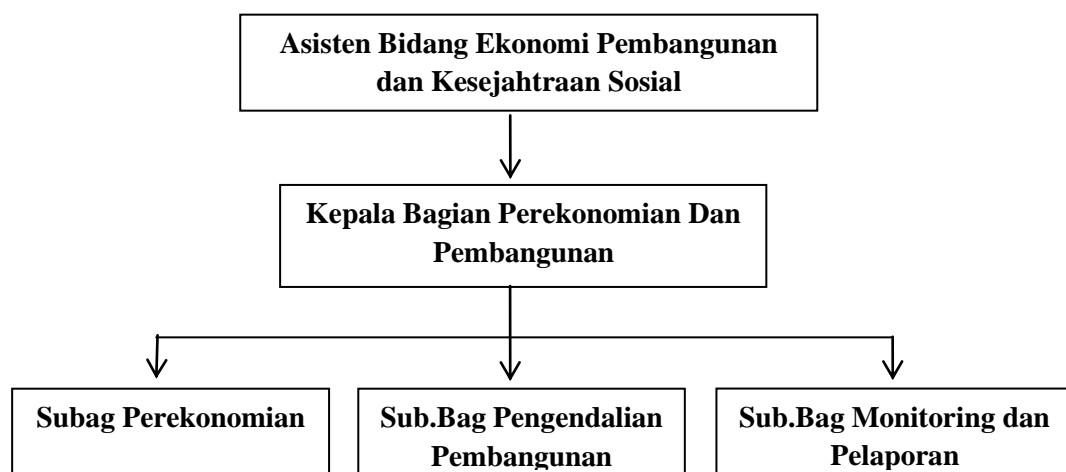
2.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Bagian Perekonomian dan Pembangunan memiliki 3 sub bagian, sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perekonomian
- b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
- c. Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan

2.2 Struktur Organisasi

Gambar. 1
Bagan Struktur Organisasi Bagian Perekonomian Dan Pembangunan



Bagian Bagian Perekonomian Dan Pembangunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut;

- a. Membantu tugas Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum dalam melaksanakan tugas dibidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun dan merencanakan program, monitoring dan pembangunan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, transportasi, industri dan perdagangan, kepariwisataan, perusahaan daerah dan perbankan;

- e. Menyusun dan menyiapkan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis dibidang peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pertambangan dan energi serta pariwisata serta transportasi dan komunikasi;
- f. Menyusun dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perkoperasian, perkreditan dan permodalan serta investasi, penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah;
- g. Melaksanakan pengadministrasian program bantuan pembangunan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;
- h. Melaksanakan analisis dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengendalian administrasi pembangunan;
- j. Melaporkan hasil kegiatan serta memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, pembangunan dan Umum dan Protokol dalam rangka pengambilan keputusan/strategi kebijakan daerah;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun uraian tugas berdasarkan sub bagian Perekonomian Dan Pembangunan sebagai berikut;

I. Sub Bagian Perekonomian

Uraian Tugas Sub Bagian Perekonomian meliputi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Melaksanakan Pengumpulan bahan penyusunan kebijakan umum dan teknis dibidang perekonomian;
- d. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perekonomian;
- f. Melakukan inventarisasi dan pendataan sarana perekonomian;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dibidang perekonomian;
- h. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



II. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan

Uraian tugas Sub Bagian Pengendalian Pembangunan meliputi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Melaksanakan Pengumpulan Bahan Penyusunan kebijakan umum dan teknis pada bidang pengendalian pembangunan;
- d. Melaksanakan pembinaan, dan evaluasi berkenaan tentang pengendalian pembangunan;
- e. Melaksanakan koordinasi pengendalian pembangunan dengan instansi dan pihak yang terkait;
- f. Melakukan kejian pengendalian pembangunan;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dibidang pengendalian pembangunan;
- h. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan

Uraian Tugas Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan meliputi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Melaksanakan Pengumpulan Bahan Penyusunan kebijakan umum dan teknis dibidang monitoring dan pelaporan;
- d. Menghimpun, meneliti, menganalisa dan mengevaluasi hasil monitoring laporan pembangunan daerah;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dibidang monitoring dan pelaporan;
- f. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Tana Tidung, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/ perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Saat ini, Bagian Perekonomian Dan Pembangunan memiliki 8 (delapan) orang



PNS yang terdiri dari beberapa strata pendidikan dan golongan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1. Komposisi Pegawai berdasar Golongan/Pangkat

NO	GOLONGAN	Jumlah
1.	Golongan IV/a (Pembina)	1
2.	Golongan III/c (Penata)	3
3.	Golongan III/a (Penata Muda)	3
4.	Golongan II/a (Pengatur Muda)	1
	JUMLAH	8

Tabel 2. Komposisi Pegawai berdasar Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	Jumlah
1.	Strata 2 (S-2)	1
2.	Strata 1 (S-1)	6
3.	S L T A	1
	JUMLAH	8

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Bagian Perekonomian Dan Pembangunan masih sangat kekurangan atau sangat minim. Secara kualitas, meskipun dipengaruhi oleh jumlah yang kurang namun dikarenakan penerapan budaya *learning by doing* dan saling berbagi informasi dengan membangun komunikasi dan transfer pengetahuan, penyelenggaraan tugas pokok dan tugas kedinasan lainnya dapat berjalan baik.



BAB III

RENCANA STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Perencanaan Strategis

Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, diamanatkan agar setiap Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pengelolaan sumberdaya dan Kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang diharapkan melalui rencana strategis masing-masing SKPD. Bagian Perekonomian dan Pembangunan merupakan salah satu organisasi pada Sekretariat Daerah yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Perencanaan Strategis Bagian Perekonomian dan Pembangunan disusun dalam rangka mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran dengan mengacu pada konsep visi dan misi Kepala Daerah.

Bagian Perekonomian Dan Pembangunan yang terdiri dari Sub Bagian Pengendalian Pembangunan, Sub Bagian Monitoring Dan Pelaporan dan Sub Bagian Perekonomian mempunyai strategi perencanaan yang digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan Bagian Pembangunan:

- a. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai tupoksinya masing-masing.
- b. Meningkatkan kualitas sistim informasi pembangunan dalam upaya mempercepat pengolahan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian masalah-masalah pelaksanaan pembangunan.
- c. Tersedianya petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik.
- d. Tersedianya pelayanan *procurement* unit/ Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- e. Tersedianya sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan.
- f. Tersedianya sistem pelaporan yang akurat dan tepat waktu.
- g. Pengendalian, dan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah.

Sasaran Bagian Pembangunan:



- a. Peningkatan realisasi program pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tana Tidung pada setiap akhir tahun anggaran berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih baik.
- b. Terwujudnya mekanisme proses pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Terselenggaranya unit pelayanan pengadaan Barang/ Jasa pemerintah (*Procurement Unit*) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- d. Terselenggaranya pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan.
- e. Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Intensitas, Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar SKPD bidang perekonomian dan pembangunan.
- g. Stabilitas tingkat inflasi daerah.

Strategi dan Kebijakan Bagian perekonomian dan Pembangunan:

- a. Menyempurnakan mekanisme monitoring proyek pembangunan dan rapat koordinasi pengendalian pembangunan dengan SKPD.
- b. Mengoptimalkan seluruh personil Bagian perekonomian dan Pembangunan dengan meningkatkan kemampuan profesionalisme kerja sesuai dengan tugas yang dibebankan pada Bagian perekonomian dan Pembangunan.
- c. Meningkatkan kinerja kelembagaan ULP dan LPSE sebagai penyelenggara dan panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.
- d. Mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta SKPD secara komprehensif.

3.2 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2018 sebagai berikut;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

- Kegiatan Penyediaan Surat menyurat
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan Ke Dalam Daerah
- Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran



- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemerintahan, dengan kegiatan:**
- Infrastruktur LPSE
 - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:**
- Pendidikan Dan Pelatihan Formal
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan keuangan, dengan kegiatan:**
- Rapat Koordinasi Dan Pengendalian (RAKORDAL)
 - Minitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan:**
- Portal Informasi Berbasis Web
- f. Program Pendukung Administrasi Pemerintahan, dengan kegiatan:**
- Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- g. Program Pengembangan data/ Informasi, dengan kegiatan:**
- Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah
- h. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, dengan kegiatan:**
- Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

BAB IV
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

4.1. Indikator dan Target Kinerja

Indikator dan Target Kinerja yang menjadi tanggung jawab Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung diambil dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 -2021 dengan batasan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian Dan Pembangunan. Rincian lengkap yang menggambarkan Indikator dan Target Kinerja sebagai berikut;

Tabel 3. Indikator Kinerja Bagian Perekonomian Dan Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Kinerja		
		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD Kabupaten Tana Tidung	Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD	%	80
		Jumlah OPD dengan tingkat penyerapan anggarannya diatas 80%	OPD	30
2	Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu dengan dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah OPD yang menyampaikan laporanrealisasi fisik dan keuangantepat waktu	OPD	30
3	Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Jumlah Paket Pengadaan yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE	Paket	120
		Jumlah pengguna (Penyedia) layananpengadaan barang dan jasasecara elektronik (LPSE)Kabupaten Tana Tidung	Penyedia	500
		Jumlah Aparatur Bagian Perekonomian & Pembangunan yang memiliki sertifikat ahli Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	8
4	Tercapainya Stabilitas harga barang dan jasa di Kabupaten Tana Tidung	Persentase Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Tan Tidung Tahun 2017	%	1,5



BAB V

PENUTUP

Dokumen ini merupakan pedoman resmi bagi Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam menjalankan aktifitas pada Tahun Anggaran 2018. Ada pun prioritas kegiatan dalam kisaran waktu tersebut adalah menyusun Rencana Kegiatan Tahunan, menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan selama satu tahun melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara optimal, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik, pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi akan menjadi metode terbaik dalam pencapaian target kinerja.

Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan bidang ekonomi dan administrasi pembangunan serta mengkoordinasikannya kepada seluruh instansi pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Dengan kata lain, kedudukan Bagian Perekonomian Dan Pembangunan menjadi sangat sentral pada sekretariat daerah Kabupaten Tana Tidung. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun ini diharapkan dapat menghasilkan keluaran (output) yang optimal.

Tideng Pale, 15 Januari 2018
Kepala Bagian Perekonomian Dan Pembangunan
Setda Kabupaten Tana Tidung


Hadi Aryanto, ST., MT
NIP. 1974041720021003